

MODERNISASI DAN PEMBERDAYAAN MADRASAH

H. Hasanuddin

Dosen Pendidikan Agama Islam (PAI)
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal

Email: Hasanuddin_70@yahoo.com.

ABSTRAK

Modernisasi mempunyai pengertian suatu proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk bisa hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam dunia Islam Modernisasi atau pembaharuan mengandung arti upaya atau aktivitas untuk mengubah kehidupan umat Islam dari keadaan yang sedang berlangsung kepada keadaan yang baru yang hendak diwujudkan demi kemaslahatan hidup dan masih dalam garis garis yang tidak melanggar ajaran dasar yang disepakati oleh para ulama Islam. Sedangkan Pemberdayaan madrasah adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada di madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah, agar mampu survive dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menuntut perubahan di saat ini dan saat yang akan datang. Oleh karena itu, Sesuai dengan perkembangan zaman hari ini, masyarakat yang serba kompetitif, madrasah tidak saja harus mampu memberikan jaminan kualitas, tetapi juga harus mampu memberikan jaminan untuk hidup wajar dan unggul di dalam masyarakat.

Kata kunci: Modernisasi dan Pemberdayaan Madrasah

A. PENDAHULUAN

Pendidikan madrasah sejak dahulu senantiasa mendapatkan permasalahan yang serius. Permasalahan itu berasal dari faktor internal yakni pengelola madrasah dan faktor pemerintah serta masyarakat umum yang menjadi stakeholder madrasah. Secara internal, salah satu penyebab timbulnya permasalahan madrasah adalah terlambatnya proses sekularisasi pemikiran, yang berkaitan dengan pemikiran pendidikan Islam. Pada umumnya masyarakat muslim kurang tanggap menangkap perubahan sehingga bisa mengadakan pembenahan dan penyempurnaan sistem pendidikan madrasah sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas merupakan keharusan dan keinginan kita semua, oleh karena itu semua pihak yang terkait harus memberikan dukungan penuh baik pemerintah, masyarakat maupun orang tua. Tanpa itu harapan untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah hanyalah sebuah mimpi. Keberhasilan sekolah-sekolah unggulan juga digunakan untuk memotret madrasah, karena keberadaan madrasah masih memerlukan kerja keras semua pihak untuk mencari solusi terhadap problema yang dihadapi madrasah saat ini.

Saat ini madrasah sedang menghadapi kompleksitas permasalahan yang tak mudah dipecahkan. Keadaan madrasah secara individual, sangat variatif dan rata-rata sangat memprihatinkan. Secara kolektif, madrasah tidak memiliki visi kebersamaan sehingga daya adaptasi dan daya perubahan atas kehidupan masyarakat muslim kurang maksimal. Pada dasarnya, secara organisasional, madrasah merupakan organisasi yang mengelola diri (self-organized) untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristiknya. Dan pengelolaan diri ini dijalankan oleh para pimpinan madrasah melalui sebuah mekanisme manajemen operatif. Pada umumnya Madrasah di Indonesia belum dikelola sebagaimana mestinya, maka diperlukan langkah-langkah strategis baik untuk meningkatkan kualitas madrasah secara individual maupun kualitas madrasah secara menyeluruh.

Kementerian Agama sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam serta pihak yang memiliki akses terhadap kelangsungan pendidikan madrasah, kurang memiliki sikap responsif terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Hal ini dapat dibuktikan, dimana sistem pendidikan madrasah sampai saat ini belum mampu mengangkat citra dan kualitas madrasah secara umum dan selalu saja kualitas madrasah masih berada dibawah pendidikan umum, walaupun berbagai inovasi dan perubahan telah dilakukan namun hasilnya belum maksimal.

B. PEMBAHASAN

1. MODERNISASI MADRASAH

Salah satu persoalan madrasah adalah modernisasi madrasah yang tak kunjung usai, bahkan hingga kini masih mencari bentuknya yang ideal. Untuk melihat proses modernisasi di madrasah, ada beberapa hal yang mutlak diperhatikan yaitu, 1). Substansi modernisasi, 2).Substansi keislaman yang menjadi ciri khas madrasah, 3). Political will pemerintah dan 4). Kesiapan masyarakat pengelola madrasah menerima perubahan. Empat hal inilah yang berpengaruh besar terhadap proses modernisasi madrasah.

Berkaitan dengan substansi modernisasi, maka hal yang perlu diperhatikan adalah manajemen yang baik, mutu yang bagus serta profesionalisme. Menyangkut dengan substansi keislaman, hal yang harus diperhatikan adalah pentingnya memelihara pendidikan sebagai media pengajaran akhlak dan moralitas bagi peserta didik. Oleh karena itu pengajaran pendidikan umum yang diajarkan di madrasah jangan sampai bertentangan dengan semangat ajaran Islam. Sedangkan yang berkaitan dengan political will, disadari atau tidak , pemerintah secara eksplisit selama ini belum memberikan perhatian serius dan komitmen terhadap pendidikan madrasah, bahkan pada selama masa "orde baru" keberadaan madrasah bagaikan " *kerakap tumbuh diatas batu, hidup segan mati tak mau*". Namun ketika bergulirnya era reformasi , maka kehadiran Undang-Undang nomor 20 tentang sistem pendidikan nasional, maka pendidikann madrasah tidak lagi dimarginalkan dan kehadiran undang-undang tersebut merupakan sebuah peluang dan harapan yang sangat besar bagi madrasah untuk lebih banyak berkiprah untuk memajukan kualitas dan mutu kelulusan madrasah dimasa akan datang.

Bila kita melihat proses modernisasi madrasah, sebenarnya telah berlangsung sejak lama dan pemerintah telah lama berupaya melakukan modernisasi madrasah, terutama berkaitan dengan modernisasi yang bersifat formalisasi dan strukturisasi. Dari perkembangan di awal abad ke- 20, madrasah telah menjadi satu lembaga pendidikan dengan ciri-ciri seperti yang dikenal sekarang, dimana pendidikan Islam memasuki tahap baru yang ditandai dengan diperkenalkannya pendidikan umum dan sistem didaktik-metodik ala Belanda.

Model madrasah ini didirikan sebagai bagian dari upaya umat Islam untuk mengadopsi sistem pendidikan moderen yang diperkenalkan Pemerintah Kolonial. Oleh karena itu, gagasan modernisasi dan kemajuan merupakan bagian penting dari perkembangan madrasah saat itu. Madrasah merupakan salah satu wujud hasrat kaum muslim untuk melangkah pada tatanan dunia baru sistem pendidikan Islam.

Perubahan dan perkembangan tersebut nampaknya belum cukup memberi ruang bagi madrasah untuk bersaing dengan sekolah umum lainnya, karena dari pihak madrasah masih memiliki keterbatasan-keterbatasan, sehingga jurang pemisah antara sekolah umum dengan madrasah masih sangat jauh. Salah satu titik kelemahan madrasah adalah penguasaan pengetahuan umum, dan untungnya pada tahun 1946, saat itu Departemen Agama mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Depdiknas yaitu dengan menambah pendidikan umum kepada siswa di madrasah.

Upaya mendorong modernisasi madrasah juga dilakukan meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan. Dan pada tahun 1958, Departemen Agama mencoba mengembangkan madrasah dengan memperkenalkan model Madrasah Wajib Belajar (MWB) yang dilaksanakan selama delapan tahun. Pendidikan madrasah dengan Model Wajib Belajar ini memuat kurikulum pengajaran yang terpadu antara aspek keagamaan, pengetahuan umum dan keterampilan. Namun sampai tahap ini madrasah tetap saja belum terorganisasi dan terstruktur secara seragam dan standar. Persoalan guru yang berkualitas rendah dan fasilitas yang masih belum memadai menjadi tantangan utama yang harus dihadapi madrasah. Dengan ditambahkan mata pelajaran umum, madrasah juga harus menambah tenaga pengajar pelajaran umum.

Seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang semakin tinggi, pemerintah dituntut untuk memperbaiki madrasah terus menerus. Pemerintah kemudian melakukan formalisasi dan strukturisasi madrasah. *Formalisasi madrasah* adalah upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan status beberapa madrasah swasta untuk menjadi madrasah negeri. Sementara *strukturisasi madrasah* adalah kebijakan yang berkaitan dengan

tuntutan pendidikan nasional terutama yang berkaitan dengan penyeragaman dan penyempurnaan kurikulum yang digunakan. Langkah tersebut kemudian membawa konsekuensi logis lain, yaitu upaya perumusan kurikulum baru bagi madrasah agar sejajar dengan pendidikan umum.

2. PEMBERDAYAAN MADRASAH

Madrasah sebagai institusi pendidikan, memegang peranan sentral dalam pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas-aktivitas pendidikan. Dalam menjalankan fungsi edukatifnya, madrasah juga berfungsi sebagai pelestari sekaligus benteng pertahanan sistem nilai dan budaya masyarakat (*norm and culhiral reserve*) yang diharapkan tidak hanya menyiapkan anak didiknya pada kematangan ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik, sehingga terbentuk pola-pola kepribadian yang relevan dengan kondisi masyarakatnya (Yahya, 1999). Kerjasama antara madrasah dengan orang tua dan masyarakat pada masa kini, umumnya baru berkisar pada pengumpulan dana untuk keperluan perbaikan atau pengadaan sarana dan prasarana madrasah. Ini belum bisa diartikan ikut bertanggungjawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pendidikan, karena seharusnya mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan terselenggaranya suatu pendidikan, termasuk didalamnya membina para anak didik agar menjauhi perilaku negatif, melakukan inovasi kurikulum, penyediaan media belajar, lingkungan belajar, muatan lokal, kesejahteraan pendidik dan sebagainya. Untuk itu, kepala madrasah dapat mengundang wakil-wakil orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat yang tertarik kepada pendidikan, seperti orang-orang berpengaruh, pemimpin agama, ketua adat, orang bisnis, budayawan, dan lain sebagainya. Kelompok ini secara bersama-sama membina para anak didik, seperti memikirkan dan mengupayakan perkembangan anak-anaknya sendiri ke arah yang positif

Pentingnya kerjasama antara madrasah, orang tua dan masyarakat sering tidak disadari oleh banyak manajer di madrasah. Hal ini diduga karena kurang profesionalnya mereka sebagai manajer madrasah, lemahnya manajemen sekolah, dan dimungkinkan oleh kesibukan para manajer dengan tugas-tugas

lain. Akibatnya, orang tua banyak yang merasa kaget apabila ada laporan mengenai anaknya di madrasah yang berhubungan dengan pelanggaran--pelanggaran yang dilakukan. Keluhan ini dapat dimaklumi karena ketidaktahuan mereka terhadap program madrasah dan bervariasinya latar belakang ekonomi, pengalaman, pendidikan dan budaya orang tua. Untuk itu, dalam menghadapi otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan, madrasah harus ditempatkan dalam kerangka *community based school*. Sebagai konsekuensinya, para pengelola madrasah harus: (a) mampu menghimpun potensi masyarakat untuk perkembangan madrasah secara optimal, (b) selalu bekerjasama dengan masyarakat dalam setiap aktifitas pendidikan dan pembelajaran (kolaboratif), dan (c) mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat luas.

Disamping itu, madrasah harus menjadi *Center of learning society*, artinya mampu menjadi perekat masyarakat dalam melaksanakan aktifitas pendidikan. Hal ini sebagai bentuk antisipasi kecenderungan masyarakat masa depan, yang gandrung akan pendidikan. Tetapi bukan pendidikan formal dan reguler, namun pendidikan yang "membebaskan" yang mampu memberikan bekal wawasan dan informasi yang aktual dan pragmatis. Untuk itu, madrasah harus mampu melahirkan program dan produk yang bisa "dijual", agar madrasah selalu menjadi tumpuan masyarakat yang ingin belajar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, madrasah sebagai salah satu institusi sosial, tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya, tetapi akan terkait dengan institusi lainnya. Sebagai bagian dari sistem sosial, konfigurasi pola-pola pendidikan dan sosial-budaya yang dikembangkan madrasah memuat interrelasi yang erat dengan institusi-institusi sosial lainnya.

Dalam kondisi masyarakat yang kompetitif sekarang ini, *interdependensi positif sangat* diperlukan. Dimana madrasah dituntut untuk pro-aktif dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya dalam rangka turut mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat. Pola-pola hubungan diharapkan mengarah pada penjalinan komunikasi yang lebih intensif. Jalinan komunikasi ini setidaknya akan memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu: *pertama*, madrasah dapat lebih mengetahui perkembangan, dan keinginan

masyarakat, dan *kedua*, madrasah dapat memainkan peranan aktif dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang pendidikan (Yahya, 1999).

Jalinan hubungan ini menjadi sebuah keniscayaan bagi kepala madrasah dan para pendidiknya. Tanpa jalinan ini, fungsi madrasah sebagai lembaga pencetak generasi muda menjadi sangat terganggu dan peran-peran strategis yang seharusnya dimainkan oleh madrasah menjadi tidak efektif. Banyak ahli pendidikan yang mempercayai bahwa, kunci perbaikan hubungan madrasah dengan masyarakat adalah keterlibatan publik/masyarakat. Adapun jenis-jenis keterlibatan masyarakat yang kemungkinan besar akan menguntungkan kedua belah pihak, dimana madrasah memperoleh keuntungan dari sumbangan yang diberikan oleh masyarakat dan orang tua memperoleh kepuasan dari keterlibatan madrasah dalam pendidikan anaknya.

Peran serta masyarakat adalah kontribusi/sumbangan atau keikutsertaan masyarakat baik dalam bentuk ide/gagasan, dana maupun sarana dalam proses pendidikan di madrasah. Dengan keikutsertaan masyarakat, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut (1) harapan masyarakat terhadap pendidikan dapat diwujudkan di madrasah, (2) masyarakat dan madrasah saling memanfaatkan secara positif, dan (3) lahirnya rasa tanggungjawab bersama antar madrasah dan masyarakat terhadap hasil pendidikan.

Untuk mendukung keberhasilan tersebut secara optimal, maka strategi yang dibutuhkan adalah (1) menginformasikan kondisi obyektif madrasah, (2) menampung gagasan/ide yang disampaikan masyarakat, (3) membentuk usaha/kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, (4) mempersilahkan masyarakat untuk memanfaatkan program maupun sarana yang dimiliki madrasah, (5) melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan program, (6) menampung dana, saran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan, dan (7) secara berkala masyarakat dilibatkan dalam membuat laporan kemajuan madrasah.

3. INOVASI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN MADRASAH

Perkembangannya yang panjang dari kehidupan madrasah di dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, banyak hal-hal positif maupun negatif yang telah lahir di dalam sejarah keberadaannya, sehingga mengharuskan madrasah merumuskan kembali paradigma baru agar peran madrasah akan lebih tajam dan terarah didalam memasuki era melenium yang penuh dengan tantangan. Selanjutnya prospek madrasah masa depan yang cerah haruslah dipersiapkan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan dari masyarakat Indonesia baru serta tuntutan-tuntutan global.

Keadaan ini menuntut reposisi madrasah sebagai salah satu wadah pengembangan generasi muda sesuai dengan perubahan visi dan misi kehidupan bangsa dalam era reformasi dengan mengaktualisasikan potensi-potensi positif yang dimiliki madrasah. Salah satu yang sekarang menjadi fokus perhatian Kementerian Agama dalam pengembangan madrasah adalah perubahan manajemen yang baik pada tingkat madrasah. Manajemen Berbasis Sekolah merupakan salah satu bentuk manajemen yang akan dikembangkan di madrasah.

Sehubungan dengan hal diatas, program pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk menciptakan Madrasah Insan Cendikia (MAN IC) disetiap Provinsi yang ada di Indonesia. Merupakan suatu perubahan mendasar terhadap manajemen madrasah, kualitas akademik, standar sarana prasarana yang dilandasi dengan suasana keterbukaan. Oleh karena itu keberadaan Madrasah Insan Cendikia (MAN IC) yang tersebar di setiap provinsi di wilayah Indonesia telah membawa angin segar bagi peningkatan mutu pengelolaan dan kualitas hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan sistem manajemen dan pengelolaan administrasi yang sudah baik, Setiap Madrasah Insan Cendikia (MAN IC) memiliki sistim rekrutmen Kepala Madrasah secara nasional. Sehingga dengan kondisi demikian maka kehadiran Madrasah Insan Cendikia (MAN IC) menjadi sekolah favorit di daerahnya masing-masing.

Keberhasilan penerapan program Madrasah Insan Cendikia (MAN IC) dipengaruhi oleh beberapa faktor dan untuk lebih jelasnya dapat dianalisa melalui

penyebaran inovasi (diffusi inovasi). Rogers dalam Ibrahim (1988, hal 60) mengemukakan ada 4 elemen pokok penyebaran inovasi atau ide baru yaitu 1. inovasi 2. komunikasi dengan saluran tertentu. 3. waktu, 4. warga masyarakat.

4. MADRASAH SEBAGAI PROSPEK MASA DEPAN

Sebagai komponen perubahan sosial, lembaga pendidikan madrasah sebaiknya dapat mewarnai perjalanan zaman dengan aspirasi, pemikiran, dan perbuatan. Demikianlah seyogyanya yang mesti diperjuangkan untuk menjaga keberadaan dan aktualisasi peran madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Tentunya dengan mentaati segala aturan main yang berlaku. Sudah saatnya pengelolaan madrasah dilakukan dengan pendekatan serius, melalui perhitungan-perhitungan yang rasional, dan perkiraan ke masa depan yang jelas. Perlu diciptakan suatu tata laku spatial yang harus dikembangkan, sehingga menumbuhkan kebersamaan yang kokoh, serta tumbuhnya tekad yang besar untuk maju seiring dengan harapan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka madrasah dalam menyongsong era globalisasi dan otonomi daerah harus prospektif, artinya mampu mememihi harapan masyarakat. Menurut analisis Ghofir (2000), harapan masyarakat itu paling tidak ada tiga, yaitu: (a) mencerdaskan, (b) mentrampilkan, dan (c) menginternalisasikan.

Pertama, mencerdaskan.

Madrasah harus mampu memberikan kesempatan berfikir kritis kepada anak didik untuk mengungkapkan pikiran-pikirannya secara bebas, tidak lagi tersekat dengan pikiran-pikiran yang parsial dan segmentatif. Terutama anak didik, harus diberi kebebasan untuk mengungkapkan pikirannya secara terbuka dan harus mampu melahirkan berbagai pemikiran yang kritis dan inovatif. Untuk itu, pendidik harus menciptakan iklim bagi terpenuhinya latihan-latihan paedagogis yang mampu menumbuhkan sikap berfikir kritis dan analitis, dengan pengayaan terhadap wawasan empirik-problematis masyarakat. Dengan kata lain, madrasah harus mampu mencerdaskan anak didik dengan indikator: kritis, analitis, progresif, inovatif, dan futuristik.

Disamping itu, secara pragmatis, madrasah harus mampu melahirkan

lulusan yang mempunyai nilai tinggi. Sebab ukuran keberhasilan pendidikan sekarang, secara formal, lebih banyak ditentukan oleh tingginya nilai. Ukuran tingginya nilai ini bersifat relatif. Madrasah dikatakan berhasil dalam mencerdaskan anak didik kalau nilai anak didik itu melebihi dari nilai sekolah umum yang setingkat di sekitarnya. Untuk itu, upaya untuk memberikan bekal pengetahuan umum yang memadai kepada anak didik di madrasah merupakan keharusan. Jika madrasah mampu melahirkan lulusan yang mempunyai nilai bagus, tidak mustahil madrasah akan menjadi lembaga alternatif.

Kedua, mentrampilkan.

Perubahan masa depan mencakup semua sektor kehidupan, lebih-lebih yang berkaitan dengan dunia kerja. Dengan banyaknya lembaga pendidikan yang memproduksi lulusan secara besar-besaran, menyebabkan terjadinya ledakan tenaga kerja produktif. Padahal daya tampung lapangan kerja di Indonesia sangat terbatas. Akibatnya, banyak pengangguran terdidik terjadi di mana-mana, sampai pada titik jenuh. Apalagi diperparah dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu seperti sekarang ini, menyebabkan lapangan kerja semakin sempit.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka madrasah harus mampu membaca perkembangan zaman. Sesuai perkembangan masyarakat yang serba kompetitif, madrasah harus mampu memberikan makna secara spiritual, intelektual sekaligus material kepada anak didik. Madrasah hendaknya tidak hanya memberikan jaminan kualitas semata, tetapi juga harus mampu memberikan jaminan untuk hidup wajar dalam masyarakat. Artinya, madrasah harus mampu memberikan bekal praktis-pragmatis kepada anak didik untuk hidup di masyarakat berupa ketrampilan-ketrampilan praktis yang dapat menjadikan alternatif sumber penghidupan bagi anak didik, khususnya bagi anak didik pada Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa, tidak semua lulusan Madrasah Tsanawiyah atau Aliyah mampu melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, karena keterbatasan biaya. Berdasarkan data menunjukkan bahwa, sebagian besar orang tua anak didik madrasah berpenghasilan rendah dan dari

kalangan petani.

Dengan ketrampilan praktis ini, diharapkan dapat membantu anak didik yang tidak sempat untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi dapat mengembangkan keterampilan itu untuk alternatif sumber dana dalam kehidupan. Pendidikan dan pelatihan yang praktis-pragmatis ini misalnya: perbengkelan, elektronika, jahit-menjahit, masak-memasak, sablon/percetakan, dsb.

Ketiga, menginternalisasikan

Menurut Mudzhar (1992) globalisasi juga mengakibatkan berkembangnya *mass culture* karena pengaruh *mass media*, sehingga kultur tidak lagi bersifat lokal, melainkan nasional bahkan global. Ini akan berakibat meningkatnya heterogenitas nilai dalam masyarakat, dimana agama yang dipeluk seseorang tidak lagi mampu mengklaim sebagai sumber kebenaran tunggal pada diri orang itu. Selain nilai-nilai agama yang dipeluknya, orang merasa perlu melengkapi dirinya dengan nilai-nilai lain yang datang dari sekitarnya, baik dari kesepakatan politik, ekonomi, maupun budaya. Kehadiran sejumlah nilai dari sumber yang berbeda secara bersandingan ini, akan menimbulkan beberapa persoalan. Persoalannya adalah bagaimana menselaraskan berbagai nilai itu dalam kehidupan ?

Pemikiran tersebut memberikan implikasi bahwa, madrasah mempunyai tanggungjawab moral untuk tidak saja mentransfer dan memformulasikan nilai-nilai lokal dan nasional, tetapi juga harus mampu menginternalisasikan dan melestarikan serta menumbuhkembangkan nilai-nilai global yang bersumber dari aspirasi bangsa dunia dimana agama merupakan unsurnya yang paling berpengaruh, sehingga anak didik dapat berhadapan dengan dunia global secara tegar.

Upaya tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terintegrasi, mulai dari tingkat Ibtidaiyah sampai Aliyah, sehingga tidak terjadi pemahaman parsial tentang tata nilai yang harus dianut oleh anak didik. Sebab arus informasi yang berkembang selama ini, diakui atau tidak, dapat membiaskan nilai-nilai yang seharusnya menjadi panutannya. Untuk itu, diperlukan peran serta semua pihak di madrasah dalam upaya internalisasi nilai pada anak didik.

Penanaman nilai termasuk nilai-nilai yang mendasari kehidupan ilmu dan teknologi serta pengaturan perubahan sosial budaya, akan lebih berhasil kalau dilaksanakan sebagai upaya kolektif yang diselenggarakan oleh semua tenaga pendidik yang terdapat di madrasah. Artinya upaya penanaman nilai ini, tidak hanya dilakukan oleh pendidik yang kebetulan memegang mata pelajaran agama (Aqidah-Akhlak, Fiqh-Syariah, Qur'an-Hadits, dan Sejarah Kebudayaan Islam), tetapi juga seluruh pendidik yang memegang mata pelajaran umum. Dengan upaya kolektif ini, beban bagi pendidik agama semakin ringan karena merupakan tanggungjawab bersama. Apabila semua tenaga kependidikan di madrasah mampu memberikan seperangkat nilai kepada anak didik, maka anak didik akan mampu mengambil pilihan-pilihan etik sesuai dengan nuraninya dalam menghadapi globalisasi kehidupan berdasarkan kerangka normatif agama.

C. KESIMPULAN

1. Modernisasi madrasah dilakukan seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang semakin tinggi, dengan melakukan upaya formalisasi dan strukturisasi madrasah. *Formalisasi madrasah* adalah upaya yang ditempuh dalam meningkatkan status beberapa madrasah swasta untuk menjadi madrasah negeri. Sementara *strukturisasi madrasah* adalah kebijakan yang berkaitan dengan tuntutan pendidikan nasional terutama yang berkaitan dengan penyeragaman dan penyempurnaan kurikulum yang digunakan.
2. Pemberdayaan madrasah sebagai institusi pendidikan, memegang peranan sentral dalam pemberdayaan masyarakat melalui aktivitas-aktivitas pendidikan. Dalam menjalankan fungsi edukatifnya, madrasah juga berfungsi sebagai pelestari sekaligus benteng pertahanan sistem nilai dan budaya masyarakat (*norm and culhiral reserve*) yang diharapkan tidak hanya menyiapkan anak didiknya pada kematangan ranah kognitif, tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik, sehingga terbentuk bola-pola kepribadian yang relevan dengan kondisi masyarakatnya.

3. Sesuai perkembangan masyarakat yang serba kompetitif, madrasah harus mampu memberikan makna secara spiritual, intelektual sekaligus material kepada anak didik. Madrasah hendaknya tidak hanya memberikan jaminan kualitas semata, tetapi juga harus mampu memberikan jaminan untuk hidup wajar dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas.(2003). Undang-Undang RI. No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta : BP.Restindo Mediatma.
- Departemen Pendidikan Nasional (2006).*Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)* Jakarta : Puskur-Balitbang.
- Departemen Agama RI (2004).*Pedoman Khusus Teknologi Informasi dan Komunikasi* Jakarta : Dirjen Kelembagaan Agama Islam.
- Ghofir, A. (2000). Tantangan dan Prospek Lembaga Pendidikan Islam (LPI) di Jawa Timur. Makalah disampaikan pada kuliah tamu di FAI Universitas Muhammadiyah Malang, tanggal 24 Mei 2000. Malang: FAI UMM.
- Havelock,G, Ronald.(1995). *The Change Agent's Guide*. Second Edition. New Jersey : Educational Technology Publications Englewood Cliffs.
- Ibrahim, (1988). *Inovasi Pendidikan*, P2LPTK, Jakarta
- Margono, Slamet, (1986).*Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Rogers M. Everett (1983). *Diffusion Of Innovations*. Third Edition. A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Sanjaya, Wina (2005). *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sukmadinata, Nana Syaodih (2005). *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sidi, Indra Djati.(2003). *Menuju Masyarakat Belajar*. Para Madina. Jakarta.
- Yahya. (1999). *Hubungan Madrasah dengan Masyarakat dan Lembaga Terkait*.Makalah *Pelatihan Manajemen Madrasah Se Jawa Timur*, Tanggal 17 Oktober s/d 15 November 1999, Malang: Hotel Palem Batu.